

**PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI  
DESA PAUH ANGIT KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI**

**Oleh : Septi Wiranda**

E-mail : [septiwiranda09@gmail.com](mailto:septiwiranda09@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Adianto S.Sos, M.Si**

E-mail: [adianto@lecturer.unri.ac.id](mailto:adianto@lecturer.unri.ac.id)

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The target group of beneficiaries of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) complained that in the distribution of BPNT there were often constraints on utilization, namely empty / late, blocked and lost balances due to lack of coordination and supervision at the time of distribution. The purpose of this study was to determine the supervision of the distribution of non-cash food aid in Pauh Angit Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. This research uses the theory of Manullang (2015) supervision which consists of 3 indicators, namely setting a measurement tool (standard), conducting an assessment, and carrying out corrective actions. This research uses a qualitative method with a case study approach. Informants in this study were the Head of Social Assistance and Security of Kuantan Singingi Regency, the Social Welfare Development Section of the Kuantan Singingi District Office, the BPNT companion of Pauh Angit Village, the TKSK chair, the head of the Pauh Angit Village E-warung, the non-KPM beneficiary family (BPNT). Informants were taken using snowball sampling. Data collection is done by observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis uses linear and hierarchical approaches. The results showed that the supervision of the distribution of non-cash food aid (BPNT) was still low so distribution, distribution was still low and not yet on target. The inhibiting factors in the supervision of the distribution of non-cash food assistance (BPNT) in the coordination and outreach of the BPNT program are low, awareness and quality of implementing resources for the BPNT program is low and the attitude of the BPNT distribution team is not yet optimal. So that there is a need for socialization and training to supervise the distribution of non-cash food aid.*

*Keywords: Supervision, Distribution, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT).*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perkembangan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, visi dan misi adalah rumusan umum mengenai periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021.

Kemiskinan di Indonesia berdasarkan BPS Tahun 2019 mencapai 24,94 juta jiwa. Hal-hal yang masih mengakibatkan angka kemiskinan itu terjadi karena dipicu kenaikan harga yang lebih tinggi pada komoditi non makanan ( perumahan atau sandang) dibandingkan pada komoditi makanan. Selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka (2019) angka kemiskinan di Kabuapten Kuantan Singingi mencapai 32.150 jiwa, hal ini menandakan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi dan masih ada sebagian masyarakat yang hidup sejahtera.

Berdasarkan Permensos No. 11 Tahun 2018 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada

keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara). BPNT bertujuan untuk :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan.
2. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT.
3. Memberikan bahan pangan dengan tetap sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sasaran BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksanaan BPNT, dan namanya termasuk di dalam Daftar KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang termasuk yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah. Pada program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pelayanan publik Kemensos, pengawasan dilakukan dengan pendekatan tiga pilar pengendalian yaitu, melalui satuan kerja, aparat pengawas internal melalui inspektorat jenderal dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini yang perlu diawasi didalam program BPNT ini adalah dalam permasalahan penyaluran kegiatannya.

Sedangkan kriteria-kriteria masyarakat yang menerima bantuan pangan melalui E-warung sebagai penyalur BPNT di bentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diantaranya:

1. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
2. KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.
3. Yang tergolong peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial, diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

Kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu antara lain :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> perorang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bahan bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai dan air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/sayur/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000.00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000.00 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak. Kapal motor, atrau barang modal lainnya, jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

Pemerintah telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program pemerintah yang berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat administrasinya dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs). BPNT dikelola oleh Kementerian Sosial, dibawah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM). Koordinasi pelaksanaan program BPNT dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan dapat memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan bertujuan penyaluran bantuan subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung program tersebut Dinas Sosial Kota Taluk Kuantan khususnya di Kecamatan Pangean telah mencatat ada sejumlah 11 titik E-Warung sebagai sarana penunjang terlaksananya Program BPNT. Pengawasan pelaksanaan penyaluran BPNT dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan badan pemeriksa kuuangan (BPK), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan perbankan, agen bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan oritas jasa keuangan (OJK). Pengawasan ekternal yang terlibat didalam pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah sekretaris tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan, badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA).

E-warung penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai

dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank penyalur.

2. Memiliki sumber penghasilan utaman yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
3. Memiliki jatingan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
4. Menjual bahan pangan paling tidak mencakup beras atau telur sesuai harga pasar. Dalam hal ini, jumlah e-warung lebih dari 1 (satu) di masing-masing wilayah kelurahan/desa untuk menghindari adanya penetapan harga di atas harga wajar.
5. Dapat melayani KPM dan Non KPM.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BNI,BTN, dan Mandiri). Kecamatan Pangean sendiri bekerja sama dengan Bank BRI.

Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksana secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di jawa, dan 3 kota di wilayah jawa timur. Jumlah KPM yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia yaitu berjumlah 1,286,194 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan senilai Rp. 1,7 triliun.Pada pelaksanaannya Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut masih terdapat beberapa kendala.

Fakta dilapangan terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang benar-benar berhak tetapi tidak menerima. Sebaliknya terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak berhak tapi kenyataannya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini terjadi dikarenakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih mangacu pada rujukan pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu.

Masyarakat, Camat, Bupati dan Gubernur sekali pun tidak dapat mengganti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada, karena sudah merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi perlu melakukan usulan data pemanfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sesuai dibantu oleh RT, Lurah/Kepala Desa agar realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kedepannya benar-benar tepat sasaran. Perlu dilakukan Basis Data Terpadu yang baru agar dapat mengakomodir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap sasaran, tolong jangan mengakomodir penerima yang didasari oleh kedekatan emosional atau ikatan saudara. Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa Pauh Angit ini adalah daerah paling banyak menerima bantuan dari pada daerah lain atau kecamatan lainnya sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), peneliti melakukan dengan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, pendamping BPNT

dan Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, pendamping BPNT dan ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pangean mengatakan bahwa merasa kebingungan menjawab pertanyaan masyarakat miskin di Kecamatan Pangean yang tidak terokomodir atau tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena data-data yang penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memang bukan kewenangan pemerintah desa, seharusnya sejak awal terdapat pendataan ulang dan komunikasi terhadap pemerintah desa dalam melakukan pendataan agar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepat sasaran.

Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Pangean khususnya Desa Pauh Angit berkata bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memang kurang tepat sasaran, karena banyak terdapat kendala di pendistribusian atau penyalurannya, masalah ketidaktepatan sasaran ini dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu, meninggalnya penerima bantuan, bagi penerima bantuan yang sudah meninggal masih menerima bantuan hal ini dikarenakan pemerintah pusat memakai data lama sebagai acuan untuk kuota penerima tanpa melakukan verifikasi data terlebih dahulu ke daerah pelaksanaan program tersebut. Doublenya penerima bantuan, hal ini dikarenakan sebelumnya BPNT adalah lanjutan dari program Rastra, setelah melakukan pembaharuan dari Rastra ke BPNT menjadi dua data maka terdapat double atau lebih yang menerima bantuan. Pindahanya penerima bantuan dari desa, bagi penerima bantuan yang pindah masih terdata di desa yang lama

hal ini dikarenakan belum ada pembaharuan dari pemerintah yang terkait dan masih menerima bantuan. Dan ada yang benar-benar miskin namun tidak tercover.

Tugas pendamping sosial atau pendamping BPNT adalah

1. Menyusun rencana kerja di wilayah dampungannya.
2. Melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM BPNT dan masyarakat umum.
3. Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM BPNT berdasarkan kedekatan geografis.
4. Melaksanakan proses bisnis BPNT yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemuktahiran data, pertemuan bulanan P2K2 dan KPM mandiri.
5. Memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT KIS, KIP bantuan sosial atau subsidi lainnya.
6. Melakukan pendamping BPNT melalui mediasi, falisitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM BPNT.
7. Menyusun laporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas kabupaten kota secara berkala.

Kecamatan Pangean merupakan salah satu Kecamatan yang telah menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangean direalisasikan di 17 desa di Kecamatan Pangean. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Pangean di laksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Dengan mengangkat judul **“PENGAWASAN**

## **PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA PAUH ANGIT KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI:”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di diharapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengacu perkembangan penelitian khususnya bidang administrasi publik, terutama untuk pengembangan teori-teori Pengawasan Pengawasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa

Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi instansi terkait, khususnya Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean dalam bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan Pengawasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya program Studi Administrasi Publik. Sebagai bahan acuan perbandingan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengawasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Konsep Teori

### 2.1 Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berperan untuk mengendalikan proses manajemen, agar manajemen dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang di kerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana.

**Admosudirdjo** dalam **Andri Feryanto** dan **Endang Shytha Triyana(2015:63)**, mengatakan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengemukakan

pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. (**Reksohadiprodjo,2015:63**).

**Manulang(2015:184)**, menyatakan bahwa proses pengawasan dimana pun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan alat ukur (standar).

Alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilain itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilaian itu harus dikemukakan, dijelaskan kepadanya. Ini memang perlu, agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugas itu. Bila ini tidak diketahuinya, maka ia akan meraba-raba kemana kegiatan itu diarahkan. Untuk mencapai maksud yang sama, yakni bawahan memahami standar yang digunakan atasannya, maka standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama. Dengan kata lain, ataan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

2. Mengadakan penilaian.

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah penilaian. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk melaksanakan tugas ini dua hal yang harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) hasil pekerjaan bawahan (*actual result*). Bila

kedua hal tersebut diatas tersedia, jadi baik standar maupun actual result sudah ada, pimpinan dapat mengadakan penilaian. Jadi, pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Jadi, standar menilai kenyataan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan.

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, haruslah diambil tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan itu tidak semata-mata dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itu, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Bila hal ini memang tidak mungkin, maka adanya laporan penyimpangan itu menjadi bahan penyusunan rencana berkaitan berikutnya.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,

aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Fokus terletak pada Pengawasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan penyaluran beras, penyaluran beras yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi belum tepat sasaran dan pembagian penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak tepat sasaran.

#### **3.3 Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu pihak-pihak yang paham atau yang mengetahui tentang penelitian ini. Informan penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah penetapan informan penelitian dengan orang-orang yang mengetahui dan memiliki informasi terkait Bantuan Pangan Non Tunai, karena pada kesehariannya informan senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Adapun yang menjadi informan diantaranya :

- a. Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kuantan

- Singingi oleh Nia Kusnita, S.Sos, M.si.
- b. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi oleh Irhandi S.Sos.
  - c. Pendamping BPNT Kecamatan Pangean Eddra.
  - d. Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) oleh Erman Dodi.
  - e. Ketua E-Warung oleh Raman Candra.
  - f. Keluarga penerima manfaat (KPM) tiga orang oleh Mar, Juniar, Mansur.
  - g. Masyarakat/ non KPM dua orang oleh Ernawati.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informan yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Melalui responden atau sumber pertama berupa dokumentasi observasi, berita-berita dan informasi-informasi yang belum diolah hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, keluarga penerima bantuan BPNT, pendamping BPNT, ketua TKSK Kecamatan Pangean dan ketua E-warung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam bentuk naskah, atau dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu (jurnal), skripsi, dan berita online. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen seperti perpustakaan dan instansi/dinas yang terkait mengenai bantuan pangan non tunai untuk mendapatkan informasi tertentu yang

relevan dengan permasalahan penelitian termasuk undang-undang dan beberapa hal lainnya berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara peneliti lakukan secara langsung (*face on face*) dan bersifat terbuka. Wawancara mulai dilakukan pada bulan November sampai bulan Maret. Wawancara dilakukan untuk menemukan beberapa hambatan yang ditemui peneliti dalam melakukan wawancara.

#### b. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan metode turun kelapangan secara langsung untuk melihat dengan jelas semua kegiatan dan aktivitas dari Pengawasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), peneliti mencatat dan merekam proses observasi berupa aktivitas dalam lokasi penelitian baik secara terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan sebagai proses pengumpulan data. Pengamatan peneliti dilakukan mulai bulan November sampai bulan Maret, pengamatan dilakukan untuk menemukan beberapa hambatan yang ditemui peneliti dalam melakukan pengamatan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh pihak terkait dengan beberapa dokumentasi yang diambil langsung oleh peneliti dilapangan. Data yang diambil peneliti berupa file, foto, catatan pribadi dan juga mengumpulkan dokumen yang

berupa dokumen publik di internet, jurnal, koran, dan majalah dengan tujuan melengkapi data peneliti yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, dokumentasi di ambil langsung oleh peneliti di lapangan dari bulan November sampai bulan Maret.

### 3.6 Analisa Data

Peneliti menggunakan analisis data dengan Pendekatan linear dan hierarki yang dibangun dari bawah keatas, tetapi dalam prakteknya saya melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisa data. Dalam Creswell, untuk melihat analisa data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik sehingga umum dengan berbagai level analisa data yang berbeda. Langkah analisa data menurut (Creswell, 2013).

Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis, langkah ini dilibatkan transkrip wawancara, men-scaning materi, mengetik data lapangan, atau meilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi sehingga peneliti mendapatkan hal-hal mengenai pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Membaca seluruh data, langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data yang setelah wawancara, lalu peneliti memeriksa kembali mengenai pengawasan penyaluran bantuan pangan

non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan fenomena yang ada dilapangan mengenai pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. Peristiwa ini melibatkan fenomena yang diteliti dalam pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kemabali dalam narsi/laporan kualitatif. Setelah hasil data wawancara di dapat, peneliti membuat sebuah laporan yang dideskripsikan secara mendetail mengenai pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Langkah akhir adalah dengan menginterpretasikan atau memaknai data, dalam penelitian ini analisis data menggunakan strategi mentriangulasi (triangulasi). Dalam langkah akhir ini, peneliti berharap agar bisa menjawab mengenai tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui bagaimana pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Alasan menggunakan strategi triangulasi karena pertama, strategi ini mudah terjangkau untuk digunakan peneliti, kedua secara praktis metode ini lebih mudah di praktekkan untuk memvalidasi data. Peneliti mengumpulkan data melalui beragam sumber agar hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dianalisis seutuhnya.

Analisis data adalah aktivitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil peneliti, data-data yang didapatkan akan dikumpulkan dan diklarifikasi menurut jenisnya. Kemudian peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yang berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala jenis fakta yang berhubungan dengan pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **4. Hasil Pembahasan**

##### **4.1 Pengawasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

###### **1. Menetapkan alat ukur (standar).**

Alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilain itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilaian itu harus dikemukakan,

dijelaskan kepadanya. Ini memang perlu, agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugas itu. Bila ini tidak diketahuinya, maka ia akan meraba-raba kemana kegiatan itu diarahkan. Untuk mencapai maksud yang sama, yakni bawahan memahami standar yang digunakan atasannya, maka standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama. Dengan kata lain, ataan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

###### **2. Mengadakan penilaian.**

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah penilaian. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk melaksanakan tugas ini dua hal yang harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) hasil pekerjaan bawahan (actual result). Bila kedua hal tersebut diatas tersedia, jadi baik standar maupun actual result sudah ada, pimpinan dapat mengadakan penilaian. Jadi, pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Jadi, standar menilai kenyataan.

###### **3. Mengadakan tindakan perbaikan.**

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertamata-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, haruslah diambil tindakan perbaikan. Tindakan

perbaikan itu tidak semata-mata dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itu, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Bila hal ini memang tidak mungkin, maka adanya laporan penyimpangan itu menjadi bahan penyusunan rencana berkaitan berikutnya.

#### **4.2 Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai di desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

##### **1. Rendahnya sosialisasi dan koordinasi program BPNT.**

Kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Oleh karena itu pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di

desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi harus didukung oleh berbagai pihak yang berada dalam kegiatan program tersebut, pendamping BPNT desa Pauh Angit, ketua TKSK Kecamatan, ketua E-warung desa Pauh Angit, pihak RT dan RW desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implamentor secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskan.

Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implentasi kebijkan harus diterima oleh semua personel dan harus dimengertin secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implamentor akan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada implementor secara seris mempengaruhi implemetasi kebijakan. Terkait masalah komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terkait dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka

terutama dalam program yang dilakukan pihak Desa Pauh Angit.

### **KESIMPULAN**

Hasil penemuan ini menemukan bahwa pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah masih belum baik karena penyaluran belum tepat sasaran sehingga banyak terdapat kendala di pendistribusian atau penyalurannya, masalah ketidaktepatan sasaran ini dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu, meninggalnya penerima bantuan, bagi penerima bantuan yang sudah meninggal masih menerima bantuan, hal ini di karenakan pemerintah pusat memakai data lama sebagai acuan untuk kuota penerima tanpa melakukan verifikasi data terlebih dahulu ke daerah pelaksanaan program tersebut. Doubelnya penerima bantuan, hal ini dikarenakan sebelumnya bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah lanjutan dari program Rastra, sehingga setelah melakukan pemberitahuan dari Rastra ke bantuan pangan non tunai (BPNT) menjadi dua data maka terdapat double penerima yang mendapat bantuan. Pindahnya penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dari desa, bagi penerima bantuan yang pindah dari desa tersebut masih terdata di desa lama, hal ini dikarenakan belum ada pembaharuan dari pemerintah yang terkait dan masih menerima

bantuan dan ada yang benar-benar miskin namun tidak tercover.

2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penghambat penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :
  - a. Rendahnya sosialisasi dan koordinasi program bantuan pangan non tunai (BPNT).
  - b. Rendahnya kesadaran dan kualitas SDM pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT).
  - c. Rendahnya sikap tim distributor program bantuan pangan non tunai (BPNT).
  - d.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil peneliti yang penulis lakukan tentang pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi beberapa saran sebagai berikut :

1. Bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih ditingkatkan pembaharuan data terpadu program penanganan fakir miskin atau daftar penerima manfaat program bantuan pangan non non tunai (BPNT) sehingga peserta program atau penerima manfaat ialah benar-benar penduduk yang memiliki kondisi ekonomi 20% terendah di daerah pelaksana. Selain itu untuk lebih memperhatikan kelancaran penyaluran dana bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan peningkatan kerja sama yang semakin baik mengingat salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan

ketepatan waktu penerima bantuan dan ditambah dengan peningkatan pengawasan petugas program bantuan pangan non tunai (BPNT) di wilayah pelaksanaan dalam memberikan informasi dan pelayanan terkait program.

2. Sebaiknya sosialisasi dan koordinasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penerima informasi terkait bantuan pangan non tunai (BPNT), jika kesadaran dan kualitas SDM masih rendah supaya lebih mempelajari dan memahami bersama-sama tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) agar tidak menyelenceng, dan jika sikap tim distributor masih rendah agar lebih memahami tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) supaya kegiatan ini tepat sasaran dan sistem penyalurannya bisa berjalan sebagaimana mestinya.
3. Sebaiknya aparat desa meminta daftar nama-nama keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar secara resmi sebagai penerima bantuan pangan non tunai agar dapat diketahui apakah nama-nama masih termasuk masyarakat miskin atau tidak sehingga aparat desa dapat menentukan apakah rumah tangga tersebut masih berhak menerima ataukah harus diganti dengan rumah tangga lain atau perlu adanya survei terhadap masyarakat sehingga bantuan tersebut tepat sasaran yaitu hanya diberikan kepada keluarga miskin saja. Sehingga dengan demikian tidak adanya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edwadr,2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Feryanto, Admosudirjo dan S.E Triana.2015. *Pengantar Managemen (3 IN 1)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Koontz,H.,H., Cyril O'Donnell.2013. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang.2015.*Dasar-Dasar Manajemen*.Yogyakarta:Gadja Mada Universitas Press.
- Makawimbang, Jerry H.2012. *Teori dan pengukuran (Aanalsis di bidang Pendidikan)*. Bandung.Alfabeta.
- Marnis.2008.*Pengantaran Manajemen*.Pekanbaru. UNRI Press.
- Moleong, J, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Reksohadiprodjo.Sukanto.2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi keenam. Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Ukas, Maman.*Manajemen Strategik*. Yogyakarta: UGM Pres,2000.
- Lisa Kurniati 2017, *Analisis Dampak Penerapan Bantuan Pangan Non Tunai Sebagai Pengganti Rastra dan Evaluasi Sistem Pelaksanannya di Kota Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Amanda Vitha Kurnia F. 2017. *Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi kasus kelurahan Tanjungsekar Kelurahan Lowokwaru Kota Malang)*.

Handika Yogasulistyo.2017. *Efektivitas E-warung KUBE Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di kota Yogyakarta.*

Ika Surya Kharismawati.2017. *Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-warung ( Studi kasus pada keseluruhan sidosermu,Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya).*

Supriatna, E. dan R.R (2018).*Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera.Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Malang: UMM Press.*

**Buku Pedoman BPNT Tahun 2017**

Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi .2018. *Jumlah KPM BPNT Kabupaten Kuantan Singingi.*

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. *Kementerian Bapennas, Kementerian Sosial RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor StafbPresiden RI, TN2PK.*

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyaluran Bnatuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Menteri Sosialisasi BPNT 2018.